

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup kompleks yakni membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain dengan merumuskan standar garis kemiskinan, menyusun peta kantong – kantong kemiskinan dan melakukan berbagai strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah Siswa Miskin, dan lain sebagainya.

Dalam pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Indonesia menciptakan beberapa program salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 yaitu program yang memberikan bantuan sosial khusus untuk keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH bertujuan membuka akses terutama ibu hamil dan anak yang sangat membutuhkan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan (Depsos , 2010). Manfaat dari adanya PKH untuk mendorong penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan. PKH diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada di Negara Indonesia.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kata yang sangat familiar dan terkenal belakangan ini. Menurut Permensos nomor 5 tahun 2019 DTKS menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Dan ini sangat penting, supaya pemberian bantuan dapat terarah, terukur dan tepat amanah. Dalam DTKS akan dikelompokkan dalam istilah desil (kelompok) yang terdiri atas 4 desil:

1. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin), dengan mendapat seluruh program bantuan dari pemerintah selama ada komponen di dalamnya, misalnya : PKH, BPNT, KIS PBI dan KIP;
2. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah (miskin), akan mendapat bantuan pemerintah BPNT dan KIS PBI;
3. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya (rawan miskin), akan mendapat bantuan pemerintah KIS PBI;
4. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi (agak mampu / mampu), akan dikeluarkan dari DTKS.

Jumlah keluarga miskin di Desa Campurejo yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah individu di tahun 2020 sebanyak 4.912 orang, kemudian di tahun 2021 sebanyak 6.196, data terakhir pada 2022 sebanyak 7.929 orang. Sedangkan untuk jumlah keluarga yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 1.091 keluarga, tahun 2021 sebanyak 2035 keluarga dan di tahun 2022 sudah mencapai 2.553.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik maka salah satu kecamatan yang sudah menjalankan program ini adalah Kecamatan Panceng dan salah satu desa yang mendapatkan

yaitu Desa Campurejo. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan terhadap jumlah penerima PKH di Desa Campurejo. Tetapi pada jumlah kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Karena adanya perpindahan penduduk dari luar ke desa Campurejo. Tidak keterbukaan data dari aparat desa pada kepala desa. Sehingga tidak terdapat pembaharuan pengajuan bantuan sosial terutama PKH terkait rumah tangga miskin yang terdaftar dalam DTKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial.

Modal sosial dapat mengurangi kemiskinan apabila tersedia konektivitas antara jaringan sosial tersebut melalui mekanisme pertukaran sumber daya seperti aliran informasi, kesempatan kerja, dukungan dana, atau pembelajaran diantara komunitas miskin dan tidak miskin (Grootaert, 1998). Komunitas dengan beragam jaringan sosial dan ikatan kemasyarakatan dapat menjadi strategi yang dapat digunakan untuk melawan kerentanan dan kemiskinan (Woolcock dan

Narayan, 2000). Sedangkan akar masalah kemiskinan di Indonesia adalah karena lemahnya komunitas miskin terhadap akses-akses sumber daya produktif (World Bank, 2007). Oleh karena itu, modal sosial dinilai sebagai faktor non-ekonomi yang dapat menjembatani akses terhadap sumber daya produktif tersebut.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Campurejo dalam upaya untuk memerangi kemiskinan adalah dengan melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Supaya tidak bergantung dengan bantuan tunai dari pemerintah. Agar merubah gaya hidup mereka yang semula menjadi miskin lama kelamaan dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) akan menjadi harapan pemerintah yang sebenarnya.

Dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibangun pendamping PKH diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Desa Campurejo untuk ikut berperan atau berpartisipasi dalam KUBE yang nantinya bisa memberikan dampak bagi kehidupan mereka terutama kemandirian dalam berusaha sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang selama ini menjerat keluarga sangat miskin yang ada di Desa Campurejo. Namun demikian adanya kendala atau hambatan dalam keberlangsungan KUBE dapat mempengaruhi jalannya usaha. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa penerima bantuan PKH tidak memiliki partisipasi atau kesadaran diri mengikuti KUBE

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali informasi terkait peran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di desa Campurejo melalui Kelompok

Usaha Bersama (KUBE). Sehingga dengan adanya kondisi permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **PERAN MODAL SOSIAL PADA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA CAMPUREJO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran modal sosial pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa campurejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran modal sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap penerima program keluarga harapan (pkh) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa campurejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang Program Keluarga Harapan dan memahami tentang peran modal sosial.